

DAFTAR PUSTAKA

BUKU RUJUKAN

- Afifuddin, dkk. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Afrizal. 2014. *Metode Kualitatif: sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (Ed). 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2003. *Tranparansi dalam Wujud Aslinya*. Jakarta: Piramedia
- Mustafa, Delly. 2012. *Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Rosyidi, Bakaruddin dkk. 2015. *Good Governance and Clean Governance*. Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand.
- Soemantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Citra
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Mirtah Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tjokromidjoyo. 2003. *Transparansi Perumusan Kebijakan (Politik) dari Pemerintahan, Organisasi dan Badan Usaha*. Bandung: Alfabeta

SKRIPSI/TESIS

Akmaludin, Achmad. 2012. *Transparansi Rekrutmen dan Seleksi CPNS dalam Upaya Mewujudkan Good Governance Birokrasi Daerah*. Jakarta: Piramedia

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Publik.

Kawigura, Wirawan. 2008. *Analisa Jabatan dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi*. Bandung: Pustaka Reka Cita

Syaiful. 2014. Tesis. *Kontensasi Politik Dalam Birokrasi*. Bandung. Universitas Padjajaran

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembagian Jabatan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pengisian Kepala Instansi Pemerintah di Daerah di Selaikan Paling Lambat 6 Bulan Terhitung Sejak Peraturan Pemerintahan di Undangkan. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah*. (Tidak di Publikasikan/Rahasia)

INTERNET

Analisis Jabatan, 8 Juli 2016. “Analisis Jabatan untuk Menyusun *Job Description* yang Baik”, www.portalhr.com. Diakses tanggal 28 September 2017

Dwi, Yanwariani. 2012. *Pengertian Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. (Online). (<https://yanwariyanidwi.wordpress.com>). Diakses Tanggal 26 September 2017.

Portal Garuda. 2006. *Pelaksanaan Prinsip Transparansi*. (Online). (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187836&val=PELAKSANAANPRINSIPTRANSPARANSI>). Diakses Tanggal 15 September 2017

